

2025

Minggu ke-4 November
(24 s.d. 30 November 2025)

Isu Sepekan
Bidang Polhukam, Komisi II



BADAN KEAHLIAN
DPR RI

*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

KOMITMEN PENGUATAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN

Prayudi

Analis Legislatif Ahli Utama
prayudi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan komitmen DPR RI untuk memperkuat dukungan pusat terhadap pembangunan wilayah perbatasan. Komitmen ini juga penting antara lain bagi Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja Panita Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara ke Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, pada 26 November 2025. Posisi daerah demikian memiliki arti yang strategis sebagai "etalase" Indonesia di kawasan perbatasan. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan dan kualitas infrastruktur di wilayah itu menjadi prioritas. Diungkapkan bahwa DPR RI telah menerima banyak aspirasi dari daerah yang mempunyai persoalan dalam penanganan masalah perbatasan, seperti halnya terkait kapasitas anggaran dan masih harus didorong untuk benar-benar pro aktif bagi inventarisasi kebutuhan strategisnya guna disampaikan ke pemerintah pusat.

Komitmen bagi penguatan pembangunan wilayah perbatasan di atas tampaknya sejalan dengan perhatian dari pemerintah terkait isu wilayah perbatasan. Diketahui, bahwa sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Pengelola Perbatasan (BNPP), Tito Karnavian, pada Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan, pada 17 November 2025 juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pembangunan di wilayah perbatasan.

Melalui kebijakan dan langkah-langkah yang dijalankan diharapkan mampu memanfaatkan posisi geografis Indonesia yang berada di jalur strategis perdagangan internasional, seperti halnya Selat Malaka dengan keberadaan negara tetangga, Singapura dan Malaysia. Ini melalui pengembangan kawasan bagi pusat pertumbuhan ekonomi. Indonesia harus mulai memanfaatkan keunggulan geografis tersebut dengan membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terhubung dengan jalur logistik internasional.

Tercatat ada tiga tugas besar dalam penyelesaian masalah perbatasan, yaitu: penyelesaian sengketa batas, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan pembangunan kawasan perbatasan. Mengenai PLBN, saat ini sudah ada 15 PLBN yang beroperasi dan 11 lainnya sedang dipersiapkan. Secara jumlahnya diakui belum memadai, tetapi pemerintah berjanji untuk melakukan penambahan secara bertahap. Kepala daerah setempat diharapkan menginventarisasi kebutuhan pembangunan di kecamatan perbatasan dan mengajukannya kepada pemerintah untuk dibahas lintas kementerian/lembaga dan ditindaklanjuti sesuai kemampuan anggaran nasional.

Secara umum diketahui bahwa perbatasan negara merupakan persoalan krusial yang masih dihadapi Indonesia hingga saat ini. Selain mengenai sengketa batas wilayah, juga masih harus diatasi jaminan kesejahteraan masyarakat di perbatasan, keterbatasan infrastruktur, dan rawannya aksi kejahatan. Kompleksitas masalah di wilayah perbatasan memerlukan kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari masyarakat. Keterbatasan demikian ditemukan dalam kawasan perbatasan dengan Malaysia (Kalimantan), Papua Nugini (Papua) dan Timor Leste (Nusa Tenggara Timur).

Pihak BNPP melalui realisasi APBN di tahun anggaran 2025, mencapai Rp178.364.403.005 dari pagu anggaran tahun 2025, sebesar Rp214.841.161.000,- atau 83,02 persen. Meskipun tergolong maksimal, dilihat dari capaian strategis per unit kerja eselon satunya masih perlu dukungan lebih lanjut dan kerja samanya dengan berbagai pihak bagi pelaksanaan program dan kegiatannya di lapangan agar benar-benar riil dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di kawasan perbatasan. Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 25 November 2025 antara lain sudah meminta Kemendagri segera menyelesaikan proses administratif batas di 7 kecamatan dan 54 desa/kelurahan yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi bagian wilayah Kalimantan Timur yang sekaligus cakupan wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) dan penanganan sengketa tapal batas provinsi/kabupaten/kota di wilayah Indonesia. Di samping itu, meminta BNPP mempercepat penataan dan penguatan kawasan perbatasan, penyelesaian sengketa batas negara, serta memastikan kehadiran negara melalui pelayanan dasar, infrastruktur konektivitas, dan penguatan pos lintas batas agar perbatasan tidak hanya menjadi garis batas, tetapi berfungsi sebagai beranda depan yang aman dan produktif bagi kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat.

Atensi DPR

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan komitmen DPR RI untuk memperkuat dukungan pusat terhadap pembangunan wilayah perbatasan. Komitmen tersebut penting antara lain bagi Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja Panita Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara ke Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, pada 26 November 2025. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Pengelola Perbatasan (BNPP), Tito Karnavian, pada Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan, pada 17 November 2025 juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pembangunan di wilayah perbatasan. Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan diharapkan tetap mengawal agar penanganan masalah-masalah di perbatasan negara dapat berjalan maksimal. Di samping itu, melalui fungsi anggaran mendorong percepatan penggunaan dan akuntabilitas anggaran capaian strategis di eselon 1 BNPP Kemendagri memasuki akhir tahun 2025 dan menjelang tahun 2026 nantinya berkaitan dengan penataan dan penguatan kawasan perbatasan.

Sumber

JDIH.dpr.go.id, 27 November 2025;
jentera.ac.id, t.t.;
kabardigital.com, 18 November 2025; dan
Raker/RDP Komisi II DPR RI, 25 November 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
EKKUINBANG Sony Hendra P.
KESRA Hartini Retnaningsih

EDITOR

LAYOUTER

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

EKKUINBANG

Sri Nurhayati Q.
Rafika Sari
Ari Mulianta Ginting
Eka Budiyanti
Edmira Rivani
Hilma Meilani

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Anugrah Juwita Sari
Fauzan Lazuardi R.

KESRA

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making